

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Jakarta, 27 Juli 2017

**BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Prof.Dr.LEO HARI WIRYANTO
2. Jabatan : KETUA JURUSAN - SAINS - INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
3. NHK : 295495
4. Tanggal Pelaporan : 15 Agustus 2016

**II. DATA HARTA****A. HARTA TIDAK BERGERAK ..... Rp. 242.232.000  
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 128 m2 & 63 m2, di Kabupaten BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1986 sampai dengan 1988 NJOP Rp.242.232.000

**B. HARTA BERGERAK****a. ALAT TRANSPORTASI ..... Rp. 73.000.000  
DAN MESIN LAINNYA**

1. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 1993, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 1993 nilai jual Rp.3.000.000
2. Mobil, merk DAIHATSU, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2005 nilai jual Rp.70.000.000

**b. PETERNAKAN, ..... Rp. 0  
PERIKANAN,  
PERKEBUNAN,  
PERTANIAN,  
KEHUTANAN,  
PERTAMBANGAN DAN  
USAHA LAINNYA**

<b>c. HARTA BERGERAK</b>	.....	Rp.	<b>142.300.000</b>
<b>LAINNYA</b>			
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan nilai jual Rp.142.300.000			
<b>C. SURAT BERHARGA</b>	.....	Rp.	<b>0</b>
<b>D. GIRO DAN SETARA KAS</b>	.....	Rp.	<b>575.000.000</b>
<b>LAINNYA</b>			
		USD	<b>15.000</b>
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.575.000.000, USD 15.000			
<b>E. PIUTANG</b>	.....	Rp.	<b>0</b>
<b>TOTAL HARTA (II)</b>	.....	Rp.	<b>1.032.532.000</b>
		USD	<b>15.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	.....	Rp.	<b>0</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )</b>	.....	Rp.	<b>1.032.532.000</b>
		USD	<b>15.000</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

